**PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan teori dan memahami konteks penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peran administrasi negara terhadap motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diuraikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Penulis, Tahun Terbit | Asal Universitas | Pendekatan | Fokus Utama |
| Purnamawaty, 2013 | Universitas Medan Area | kuantitatif | Motivasi tidak terbatas pada dorongan pribadi semata, melainkan juga merupakan hasil dari sistem manajemen sumber daya manusia serta fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin diposisikan sebagai pelaku utama yang dapat memengaruhi dan menggerakkan perilaku karyawan melalui pemberian panduan, penghargaan, pengawasan, serta dukungan baik yang bersifat material maupun non-material. |
| Dana, 2015 | Universitas Hasanuddin | kualitatif | Penelitian ini mengkaji motivasi kerja karyawan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dengan mengevaluasi dua aspek utama, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik yang memengaruhi semangat mereka dalam menjalankan tugas. Faktor intrinsik berhubungan dengan elemen internal seperti pencapaian, tanggung jawab, dan pengembangan diri, sedangkan faktor ekstrinsik mencakup lingkungan kerja, relasi interpersonal, posisi sosial, kompensasi finansial, serta rasa aman dalam pekerjaan. |
| Arianty, 2024 | Universitas Negeri Makassar | Kualitatif | Penelitian ini berfokus dalam mengidentifikasi dan memahami motivasi kerja karyawan di Kantor Kecamatan Panakkukang, dengan analisis yang didasarkan pada Teori Motivasi Herzberg. Teori tersebut mengklasifikasikan motivasi menjadi dua kategori utama, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik mencakup elemen seperti rasa pencapaian, tanggung jawab, serta pengembangan diri, sementara motivasi ekstrinsik meliputi pengakuan, imbalan, dan kondisi lingkungan kerja. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kedua aspek motivasi ini memberikan dampak yang substansial terhadap kinerja pegawai serta mutu pelayanan publik di kantor tersebut. |

Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar empiris dan konseptual yang kuat untuk mengkaji peran administrasi negara terhadap motivasi kerja ASN, khususnya di Kota Bandar Lampung. Ketiga skripsi tersebut menyoroti bahwa kajian-kajian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada faktor-faktor motivasi individu serta kondisi lingkungan kerja, tanpa memadukan peran krusial administrasi negara dalam merumuskan kebijakan sumber daya manusia, pelatihan yang berkesinambungan, sistem penilaian kinerja yang berkeadilan, serta mekanisme penghargaan dan insentif yang berbasis pada prestasi secara terintegrasi.

Penelitian ini mengkritik pendekatan yang terlalu mikro dan mendorong kajian yang lebih luas serta strategis, dengan menekankan peran administrasi negara sebagai lembaga pembuat kebijakan dalam membangun sistem terstruktur untuk meningkatkan motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik di tingkat daerah, seperti di Kota Bandar Lampung, serta mampu memberikan kontribusi yang substansial melalui penyajian perspektif kebijakan yang terpadu, yang mengintegrasikan teori motivasi dengan praktik administrasi negara guna mewujudkan tujuan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang optimal dan kompetitif di Kota Bandar Lampung.

2.2 Teori dan Konsep (*Good Governance*)

*Good governance* merupakan teori besar yang menjadi landasan dalam penelitian ini. *Good governance* adalah proses dan struktur yang diarahkan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip good governance meliputi:

- Transparansi : Informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik dan pegawai.

- Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan dan keputusan yang diambil.

- Partisipasi : Keterlibatan aktif masyarakat dan pegawai dalam proses pengambilan keputusan.

- Rule of Law : Penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Dalam konteks administrasi negara, penerapan good governance diyakini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kepercayaan ASN terhadap institusi, dan pada akhirnya memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik.

Partisipasi merupakan teori terapan yang menekankan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Partisipasi dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab individu terhadap organisasi atau institusi tempat mereka bekerja (Yuniastoeti et al., 2024). Dalam ranah administrasi negara, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses administrasi tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memotivasi ASN untuk bekerja secara lebih optimal karena mereka merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teori partisipasi menjadi konsep krusial dalam menganalisis peran administrasi negara terhadap motivasi kerja ASN.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori yang telah dijelaskan, kerangka berpikir penelitian ini dirumuskan bahwa administrasi negara yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi ASN. Keterlibatan ASN dalam proses administrasi (partisipasi) akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan dedikasi kerja. Dengan demikian, peran administrasi negara yang baik sangat penting dalam membangun motivasi kerja ASN di Kota Bandar Lampung. Secara skematis, kerangka berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan partisipasi ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandar Lampung masih menunjukkan variasi yang signifikan, dimana beberapa ASN mengalami penurunan semangat kerja akibat kurangnya keterlibatan dalam proses administrasi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan administrasi negara. Hal ini berdampak pada kinerja dan pelayanan publik yang kurang optimal.

Peran administrasi negara dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya aspek partisipasi, terhadap motivasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Teori Partisipasi (Arnstein, 1969) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif ASN dalam proses pengambilan keputusan administrasi sebagai faktor yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi kerja.

Administrasi negara yang menerapkan prinsip good governance dengan partisipasi aktif ASN dalam proses administrasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini akan menggali secara kualitatif bagaimana peran administrasi negara dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya partisipasi, mempengaruhi motivasi kerja ASN di Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi dalam konteks administrasi negara dan motivasi kerja ASN.

**DAFTAR PUSTAKA**

Yuniastoeti, V., & Rahmafitria, F. (2024). Analyzing local community participation and barriers in tourism village development: A case study of Mekarlaksana Village. *Spatial Planning & Management Science*, *1*(2), 61-70.